

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM ASN YANG MELAKUKAN KEKERASAN PADA ASISTEN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk)

OLEH

ALFIRANY RIVANDRO

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Mirisnya, banyak juga kita jumpai pelaku tindak pidana merupakan penegak hukum itu sendiri. Ada pula pelaku tindak pidana yang bekerja dibawah instansi pemerintah yang disebut aparat sipil negara. Hal ini dapat dibuktikan dalam studi putusan 579/Pid.B/2023/PN TJK. Terdakwa yang merupakan seorang oknum ASN didakwa dengan dua pasal kombinasi yaitu Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kedua yaitu Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap oknum ASN yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ASN terhadap asisten rumah tangga dalam perkara Nomor 579/Pid.B/2023/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian hukum Pidana Universitas Lampung. Data primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan perpektif yang mendalam dari para ahli.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan oknum aparat sipil negara yang melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangga bertanggung jawab secara pidana untuk

Alfirany Rivandro

kejahatan yang dilakukan, dan secara administratif sebagai pelanggaran etika profesi. Sanksi hukum yang dijalankan sudah cukup tegas untuk keperluan keadilan bagi korban terpenuhi sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan pertanggungjawaban hukum dan administratif terhadap oknum ASN yang melakukan kekerasan dapat ditegakkan dengan tegas, memberikan efek jera, serta memperkuat citra ASN sebagai abdi negara yang berintegritas dan diharapkan majelis hakim dalam memberikan putusan harus melihat 3 (tiga) aspek yaitu yuridis harus mempertimbangkan dengan melihat keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, filosofis memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban dan sosiologis putusan tidak bertentangan dalam masyarakat.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Oknum ASN, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ASN ACTIVITIES WHO COMMIT VIOLENCE AGAINST DOMESTIC ASSISTANTS (Study of Decision Number 579/Pid.B/2023/PN Tjk)

BY

ALFIRANY RIVANDRO

Criminal responsibility is imposing punishment on the perpetrator for an act that violates a prohibition or creates a prohibited situation. Sadly, we also often find that perpetrators of criminal acts are law enforcers themselves. There are also perpetrators of criminal acts who work under government agencies called state civil servants. This can be proven in the study of decision 579/Pid.B/2023/PN TJK. The defendant, who is an ASN, was charged with two combined articles, namely Article 80 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number. 23 of 2002 concerning Child Protection and the second charge, namely Article 44 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The problem in this study is how is the criminal responsibility for ASN officers who commit violence against domestic assistants and what is the basis for the judge's legal considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of violent crimes committed by ASN against domestic assistants in case Number 579/Pid.B/2023/PN Tjk.

This study uses a normative and empirical legal approach. The sources involved in this study were the Judge of the Tanjung Karang District Court and Lecturers in the Criminal Law Department of the University of Lampung. The primary data for this study were collected through interviews with sources. Interviews allow researchers to dig up in-depth information and perspectives from experts.

The results of this study indicate that civil servants who commit violence against domestic assistants are criminally responsible for the crimes committed, and

Alfirany Rivandro

administratively as a violation of professional ethics. The legal sanctions that are implemented are strict enough to fulfill the needs of justice for the victims while providing a deterrent effect for the perpetrators.

The suggestion from this study is that it is hoped that legal and administrative accountability for ASN individuals who commit violence can be enforced firmly, provide a deterrent effect, and strengthen the image of ASN as civil servants with integrity and it is hoped that the panel of judges in making a decision must look at 3 (three) aspects, namely the legal must consider by looking at witness statements, defendant statements, evidence, philosophically providing justice for the defendant and victim and sociologically the decision does not conflict with society.

Keywords: Criminal liability, ASN Individuals, Domestic Violence.